

---

**KEBIJAKAN PUBLIK DESA WISATA SOLUSI EKONOMI DI MASA PANDEMI COVID-19  
UNTUK Mendukung EKONOMI PERTAHANAN**

Oleh

**Rianto<sup>1)</sup>, Kasih Prihantoro<sup>2)</sup>, Suhirwan<sup>3)</sup>, Anton Iman Santosa<sup>4)</sup>, Budi Pramono<sup>5)</sup>,  
Guntur Eko Saputro<sup>6)</sup>, Lukman Yudho Prakoso<sup>7)</sup>**<sup>1</sup>STPT Trisakti,**Jl. IKPN Bintaro No.1, RT.4/RW.10, Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta 12330**<sup>2,3,4,5,6,7</sup>Universitas Pertahanan Republik Indonesia,**Kawasan IPSC Sentul, Sukahati, Kec. Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16810**Email: [kamalekumdeplek@gmail.com](mailto:kamalekumdeplek@gmail.com)**Abstrak**

Pandemi Covid-19 telah berdampak kepada lingkungan strategi global, regional dan nasional. bidang ekonomi merupakan bidang yang sangat terdampak secara menyeluruh. Kondisi saat ini harus segera dicarikan solusi yang efektif dan efisien agar tidak menjadi ancaman yang lebih serius lagi terhadap pertahanan Negara. metode yang digunakan pada tulisan ini adalah deskriptif kualitatif fenomenologi dengan menggunakan teori implementasi kebijakan pertahanan Lukman Yudho Prakoso yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan pertahanan dapat berjalan dengan baik jika memperhatikan faktor Integrative, Interactive, Transparency, Controlling dan Accountability (IITCA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terintegrasinya penanganan ekonomi antara pemerintah pusat dan daerah, komunikasi yang interaktif masih menjadi kendala utama, dengan tertangkapnya Menteri Sosial menunjukkan masih adanya masalah besar terkait faktor transparency, controlling dan accountability. Desa wisata menjadi salah satu program yang digagas pemerintah di tengah masa pandemic Covid-19, yang diharapkan dapat menimbulkan geliat ekonomi khususnya dipedesaan, agar program ini optimal dipandang perlu juga untuk membekali program bela negara terhadap setiap pihak yang terlibat, agar tidak rentan disusupi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kesimpulan dari tulisan ini adalah sesuai dengan teori Kasih Prihantoro, agar program desa wisata berkarakter bela negara sebagai pondasi ekonomi pertahanan dapat berjalan dengan baik maka harus dibangun network yang efektif dan efisien juga harus ada pihak yang bertindak sebagai driver force.

**Keyword: Bela Negara , Covid-19, Desa Wisata, Ekonomi Pertahanan****PENDAHULUAN**

Setelah krisis ekonomi tahun 1998, Indonesia mengalami beberapa kali krisis lagi tetapi tidak sehebat pada masa pandemic. Dampak dari pandemi Covid-19 telah memporakporandakan perekonomian dunia, termasuk Indonesia yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada 2020 lalu. Di level global, dampak perubahan iklim juga akan mengancam perekonomian dan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Perubahan iklim yang terjadi akan menyebabkan fenomena kenaikan permukaan air laut dan kemudian menimbulkan perubahan musim atau iklim yang semakin sulit ditebak. Segala dinamika tersebut akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Jika pemerintah tidak

mampu mengatasi dampak dinamika ancaman tersebut maka potensi ancaman pertahanan Negara akan semakin kuat.

Ekonomi dan pertahanan bisa menjadi dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Artinya, pertahanan yang kuat membutuhkan kekuatan ekonomi yang baik. Sebaliknya, kekuatan ekonomi membutuhkan stabilitas keamanan. Sehingga keduanya tak bisa dipisahkan. Dengan adanya situasi global, regional dan nasional, bidang ekonomi menjadi sorotan yang harus segera dibenahi mengingat menyangku hajat hidup orang banyak yang terkait dengan kebutuhan mendasar masyarakat. salah satu program nasional yang digagas pemerintah adalah Program Desa Wisata yang diharapkan dapat menjadi efek

pengungkit ekonomi khususnya masyarakat desa.

Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki akses masuk yang sangat luas pula, sehingga kemungkinan kejahatan yang mengganggu pertahanan dan keamanan dalam negeri Indonesia kemungkinannya sangat besar. Dengan adanya program desa wisata bisa menjadi peluang ancaman-ancaman tersebut dapat saja menyusup pada program ini jika pemerintah tidak dengan proaktif menyiapkan segala sesuatunya untuk mengantisipasi segala kemungkinan ancaman yang dapat saja timbul.

Pada artikel ini penulis akan menganalisis bagaimana solusi dari permasalahan ekonomi saat ini yang dapat berdampak buruk terhadap pertahanan negara jika tidak segera dicarikan solusinya. tulisan ini akan menganalisis dari sudut pandang ilmu ekonomi pertahanan Ekonomi pertahanan merupakan suatu studi terhadap alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilisasi yang diaplikasikan pada topik-topik yang berhubungan dengan pertahanan (Hartlet et al, 1995).

## **LANDASAN TEORI**

Artikel ini menggunakan beberapa referensi menggunakan beberapa tulisan ilmiah terdahulu diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ervin Eri Santika (Santika, 2017) dengan judul artikel Partisipasi Masyarakat dan Pengembangan Desa Wisata Jembrak Kec. Pabelan Kab. Semarang. Desa wisata Jembrak memiliki potensi yang dapat dikembangkan seperti potensi fisik ataupun non fisiknya. Di desa Jembrak ini juga memiliki potensi unggulan yaitu perkebunan empon-empon (rempah-rempah) seperti kunyit, jahe, temulawak, dll yang dimiliki masyarakat lokal yang dapat ditawarkan untuk wisatawan mulai dari pemanenan hingga pembuatan jamu tradisional. Dalam tahapan persiapan, pelaksanaan, pengawasan hingga pelestarian dilakukan dari pemerintah desa, Pokdarwis dan juga masyarakat lokal ikut terlibat didalamnya. Tetapi tidak sepenuhnya masyarakat terlibat semuanya, ini hanya beberapa perwakilan dari masyarakat seperti tokoh masyarakat. Untuk partisipasi dalam pengembangan desa wisata ini masih terlihat dominan dari pemerintah desa.

Masyarakat masih belum percaya diri untuk berpartisipasi dalam pemikiran ataupun tenaga untuk pengembangan desa wisata namun siap untuk berpartisipasi apabila diajak secara aktif oleh pengelola.

Tulisan ilmiah lainnya yang menjadi referensi adalah Dian Herdiana (Herdiana, 2019) yang berjudul Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. Pengembangan desa wisata merupakan bentuk kebijakan pembangunan perdesaan yang mencoba melakukan diversifikasi desa yang selama ini banyak berbasis kepada pertanian. Desa wisata dikembangkan untuk menjadi desa yang berbasis kepada industri wisata, baik usaha jasa maupun usaha niaga dalam bentuk produk wisata. Desa wisata dalam pengembangannya merupakan proses penggalian potensi yang ada di desa baik itu berasal dari unsur alam, sosial, budaya, masyarakat atau lainnya, sehingga sifat alamiah dan kelestarian karakteristik desa tetap terjaga dan terpelihara.

Masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan desa harus senantiasa dilibatkan dalam keseluruhan proses pengembangan desa wisata, mengingat bahwa tujuan pengembangan desa wisata selain untuk mengembangkan karakteristik, nilai-nilai tradisi dan budaya menjadi sebuah objek wisata, juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat harus berperan dan menjadi pihak yang diuntungkan. Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat merupakan pendekatan yang menawarkan peran yang lebih kepada masyarakat untuk terlibat dalam keseluruhan proses pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat juga mengakui eksistensi masyarakat sebagai bagian integral dari desa, sehingga proses yang dilaksanakan ditujukan sepenuhnya untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Program Desa Pariwisata berdasarkan referensi penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih ditemukannya permasalahan yang berdampak kepada dampak yang kurang optimalnya hasil desa wisata dalam membantu perekonomian masyarakat pedesaan khususnya pada masa Pandemi Covid-19/ Sehingga dalam penulisan artikel saat ini penulis akan mencoba mencari solusi terbaik agar program desa wisata yang saat ini sedang dikembangkan dapat memberikan manfaat yang lebih baik.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (library research), sebagaimana diungkapkan oleh Zed (2004) yang menyatakan bahwa studi kepustakaan merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian, sehingga dalam penelitian ini referensi kepustakaan menjadi sumber utama. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari berbagai literatur, karangan ilmiah, baik berupa buku-buku, jurnal dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan pengembangan desa wisata.

Sumber data dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, laman web dan referensi lainnya yang dianggap relevan dengan tema dalam penelitian ini, yaitu mengkaji pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode analisis deskriptif, dimana diartikan sebagai usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan suatu analisis terhadap data tersebut, adapun data-data yang dikumpulkan berupa katakata, gambar dan bukan dalam bentuk angka-angka (Surakhmad, 1990). Dalam hal ini data-data mengenai pengembangan desa wisata dikumpulkan dari berbagai sumber untuk kemudian oleh peneliti dilakukan analisis dan interpretasi dari data tersebut

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung dibawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama sesuai ketrampilan dan kemampuan masing-masing memberdayakan potensi secara kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona sehingga tercapai peningkatan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah itu.

Desa Wisata merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan, mewadahi peran dan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di wilayahnya, meningkatkan nilai kepariwisataan serta memberdayakannya bagi kesejahteraan masyarakat, keikut sertaan dalam mensukseskan pembangunan kepariwisataan.

Desa Wisata dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata di wilayah mereka agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi para wisatawan yang berkunjung, serta memiliki kesadaran akan peluang dan kesiapan menangkap manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat .

Tujuan dari pembentukan Desa Wisata untuk meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah, membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat dan memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah.

Fungsi Desa Wisata merupakan sebagai wadah langsung bagi masyarakat akan kesadaran adanya potensi Wisata dan terciptanya Sapta Pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata dan sebagai unsur kemitran baik bagi Pemerintah propinsi maupun pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam upaya perwujudan dan pengembangan kepariwisataan di daerah.

Ekonomi pertahanan berasal dari dua kata penting yang memiliki pengertian masing-masing yaitu ekonomi dan pertahanan. Terdapat perbedaan konsep yang menonjol antara ekonomi dan pertahanan. Perbedaan utama terletak pada watak dari kedua konsep tersebut yaitu, ekonomi mengutamakan “kedaulatan terletak pada kebutuhan manusia yang tidak terbatas”, sedangkan watak pertahanan adalah “kedaulatan ada di tangan negara”. Hal ini memberikan suatu konsekuensi : “Jika disepakati untuk menghilangkan kegiatan ekonomi berarti menegasikan hakikat manusia, dan jika menghilangkan kegiatan pertahanan berarti

menafikan kehadiran negara”. Karena itu perlu menghubungkan kedua watak yang berbeda itu sehingga keduanya berhubungan erat dan saling melengkapi (Makmur Keliat, 2010)

Untuk melihat ekonomi dan pertahanan perlu dilihat konsep masing-masing dimana keduanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan suatu negara dapat ditingkatkan melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun pemerintah akan dapat melaksanakan berbagai program yang dapat merangsang pertumbuhan apabila kondisi negara dalam keadaan aman. Dengan demikian untuk meningkatkan kesejahteraan, pemerintah juga berkewajiban untuk mewujudkan keamanan nasional. Keamanan nasional merupakan suatu kondisi atau keadaan yang menggambarkan terbebasnya negara, masyarakat dan warga negara dari segala bentuk ancaman dan atau tindakan, baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Keamanan nasional juga bisa diartikan sebagai kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara melalui kekuatan ekonomi, militer dan politik serta pengembangan diplomasi. (Sekretariat Jendral Dewan Ketahanan Nasional, 2010)

Pembangunan maupun upaya untuk mencari solusi di tengah Pandemi Covid-19 harus juga mempertimbangan faktor lain, terutama terkait pertahanan dan keamanan. Dengan demikian pembangunan yang dilaksanakan juga harus dapat menciptakan rasa aman dan nyaman di antara para individu maupun kelompok dalam menjalankan kegiatannya agar mereka dapat meningkatkan utilitasnya secara maksimal. Untuk menciptakan rasa aman tersebut perlu pertahanan untuk mengeliminir ancaman yang dihadapi suatu negara. Perlindungan negara yang diberikan kepada segenap bangsa dan seluruh tumpah diartikan sebagai perlindungan keamanan kepada segenap warga negara dan semua wilayah beserta seluruh sumber daya yang ada di dalamnya.

Bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang terjadi saat ini makin bersifat multidimensional seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan komunikasi. Oleh karenanya, segenap bangsa Indonesia dituntut dapat mengatasi setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri.

Terkait dengan adanya program desa wisata, hal ini diperlukan sebuah pemahaman akan

pentingnya kesadaran bela negara. Dan hal ini memerlukan peran serta aktif dari segenap bangsa Indonesia agar kita dapat menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kesadaran bela negara memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3, yang mengamatkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” dan Pasal 30 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”

Untuk melaksanakan amanat UUD 1945 tersebut, dirasa perlu menjabarkannya ke dalam bentuk program atau kegiatan yang kongkrit kepada semua lapisan masyarakat. Kewajiban bela negara tidak hanya dilakukan oleh militer, tetapi bisa dilakukan oleh mereka yang bukan militer, utamanya untuk menghadapi ancaman non-militer seperti ancaman tanpa bersenjata yang mempunyai kemampuan membahayakan atau berimplikasi mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.

Program Desa Wisata dan kaitannya dengan bela Negara jelas bahwa bela negara itu penting untuk ditanamkan sebagai landasan sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Sekaligus untuk membangun daya tangkal bangsa menghadapi kompleksitas dinamika ancaman guna mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara juga menjadi modal sosial bangsa untuk membangun diri menjadi bangsa yang lebih maju, berkepribadian dan berbudaya, yang sejajar dengan negara maju lainnya dalam peradaban dunia.

Di masa yang akan datang diperlukan sebuah konsep dan program bela negara yang efektif, sehingga segenap warga negara dapat ikut serta dalam program-program yang dilaksanakan, baik oleh instansi pemerintah maupun komunitas bela negara. Oleh karenanya, pendidikan bela negara menjadi sesuatu hal yang wajib. Hal ini sejalan dengan kenyataan empiris yang berkembang saat ini, yaitu jika dikaitkan dengan kondisi empiris Indonesia yang berada pada persimpangan kepentingan dunia. Realitas empiris inilah yang menjadi satu kebutuhan Indonesia untuk melakukan reorientasi sistem ketahanan nasional. Selain itu, adanya kepentingan masa depan, khususnya dikaitkan dengan potensi ancaman di masa yang akan datang.

Program DEsa Wisata dan kaitannya dengan Pembangunan karakter bangsa melalui

pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap warga negara Indonesia menjadi hal yang sangat penting. Untuk itu perlu menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kerangka pertahanan negara, serta penguatan jati diri bangsa yang berkepribadian dan berkebudayaan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara pada program desa wisata setidaknya menyiapkan insan yang berwawasan kebangsaan, berkarakter serta memiliki integritas sehingga dapat berkontribusi bagi kemajuan serta keutuhan NKRI. Penyiapan SDM yang handal tersebut tentu berdampak pada kualitas pola pikir dan tindakan yang positif didalam mengelola sumber daya nasional untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sehingga dengan kesadaran membangun negara yang baik akan membangkitkan semangat kolektif mencapai kejayaan Indonesia.

Karena sudah saatnya nama Indonesia semakin harum dan martabatnya semakin tinggi, berprestasi kelas dunia di berbagai bidang, berperan serta dalam berbagai kegiatan mulia, serta berkolaborasi dengan bangsa lain dalam menciptakan keamanan dan kedamaian dunia. Semangat kolektif dan sikap berinovasi perlu juga digencarkan agar tercipta temuan-temuan baru oleh putra-putri bangsa Indonesia. Sehingga negara lain akan menilai Indonesia sebagai bangsa yang memiliki daya saing. Mungkin ini adalah bagian dari aksi riil dari sebuah program bela negara.

Di bidang wisata dengan adanya program desa wisata contohnya, program bela negara juga dapat dilakukan dengan cara yang masiv dan bersinambungan, diantaranya adalah dengan membina para petani dan masyarakat desa lainnya di desa-desa untuk dapat bersaing dengan produk luar negeri. Para kader bela negara dapat melakukan pendampingan pemasaran kepada petani akan hasil produk-produk pertaniannya. Hal ini menjadi penting dilakukan, mengingat saat ini begitu sengitnya gempuran impor yang masuk ke negeri yang kita cintai ini.

Berikut adalah hasil pengumpulan data apa yang terjadi terhadap program desa wisata yang perlu dicarikan solusinya melalui kombinasi dengan program bela Negara:

#### **Lemahnya Sumber Daya Manusia.**

Sumber Daya Manusia menjadi tantangan yang cukup berat dalam pengembangan desa wisata, hal ini mengingat sumber daya manusia menjadi

juru kunci yang menentukan segala sesuatu yang perhubungan dengan desa wisata dan pariwisata. Di tangan pengelola dengan sumber daya yang berkompeten, niscaya desa wisata dapat berjalan dan tumbuh maju, namun sebaliknya di tangan sumber daya manusia yang kurang maka desa wisata akan jalan di tempat atau bahkan gulung tikar.

Oleh karena itu dalam upaya pengembangan desa wisata sangat mementingkan profesionalisme sumber daya manusia, baik dalam pengelolaan investasi atau dalam bidang akomodasi, transportasi, komunikasi dan informasi.

Keberadaan sumber daya manusia yang berkompeten ini juga pada sektor yang berhubungan dengan pariwisata lainnya, misalnya mereka yang mendirikan rumah makan di dekat desa wisata, mereka yang menjual atau memproduksi barang kerajinan, karenanya perlu ada satu pemahaman dan pengetahuan yang cukup, sehingga dapat bersama-sama membangun desa wisata yang maju.

Jika Desa wisata yang ada dikelola oleh sumber daya manusia yang rendah maka tidak menutup kemungkinan bahwa sektor pariwisata akan dikuasai oleh investor luar desa yang memiliki sumber daya manusia yang lebih baik dan lebih siap dari segi modal. Tentu hal ini ada plus minusnya, namun akan jauh lebih baik jika keseluruhan pengelolaan dapat dilakukan oleh sumber daya manusia lokal desa.

#### **Kegiatan Wisata ditakutkan akan merusak nilai budaya local.**

Kegiatan desa wisata yang ketal akan adat istiadat, atraksi budaya dan sarat dengan unsur tradisional memang menjadi nilai tersendiri dan menjadi daya tarik kunjungan wisata, akan tetapi hal ini juga dinilai dapat merusak dari nilai budaya lokal desa.

Sebagai gambaran seperti terjadinya pergeseran nilai upacara adat yang dapat mengarah kepada komersialisasi untuk tujuan 'dijual' sebagai pertunjukan wisata. Kondisi ini tentu tidak seutuhnya demikian, oleh sebab itu tantangan ini perlu diselesaikan dengan baik, yaitu agar nilai luhur budaya lokal tetap terjaga dengan baik walau berbalut dengan kegiatan desa wisata.

**Sistem Informasi yang masih kurang memadai.** Sistem informasi menjadi bagian penting dalam keberlangsungan kunjungan wisatawan baik mancanegara atau lokal, mengapa demikian? Karena sering kali sifat informasi disalah pahami, misalnya ketika terjadi kerusuhan di Jakarta orang-

orang atau calon wisatawan mancanegara menganggapnya bahwa seluruh Indonesia sedang tidak aman sedang terjadi kerusuhan.

Oleh sebab itu perlu adanya sistem informasi yang memadai yang memberikan update terbaru dan mampu memberikan informasi bahwa lokasi kunjungan wisata dalam kondisi aman untuk dikunjungi. Hal ini terlebih misalnya untuk daerah tujuan wisata alam seperti berdekatan dengan gunung aktif, maka sistem informasi tentang aktivitas gunung harus benar-benar terbaharui dan dapat tersampaikan ke masyarakat luas.

Keberadaan sistem informasi ini yaitu untuk memberikan klarifikasi, sekaligus secara proaktif menyiapkan dan memberikan informasi tentang obyek wisata, kesiapan sarana, prasarana dan lain-lain. Informasi seputar rute menuju lokasi, fasilitas di lokasi kunjungan dan informasi lengkap seputar daerah kunjungan wisata perlu untuk disampaikan dengan sistem informasi yang baik dan tepat sasaran.

### **Pemberitaan Media Tentang Keamanan Indonesia.**

Tidak dapat kita pungkiri bahwa keamanan Indonesia dari ancaman terorisme masih menjadi pertimbangan ketika pelancong mancanegara akan memutuskan masuk berwisata ke Indonesia. Rekam jejak peristiwa terorisme dan kerusuhan di Indonesia masih sering terjadi, dan hal ini menjadi salah satu penghalang bagi wisatawan mancanegara menuju Indonesia.

Misalnya kasus terorisme yang terjadi di Sarinah Jakarta beberapa waktu lalu, peristiwa ini berhasil ditangani dengan baik oleh pihak keamanan Indonesia, akan tetapi bagi pemerintah negara lain tetap menjadikan kejadian tersebut sebagai kehati-hatian. Sehingga mereka mengeluarkan peringatan bagi warganya yang berkunjung ke Indonesia, hal ini tentu saja mempengaruhi pasar wisata Indonesia.

Kondisi keamanan Indonesia menjadi tantangan bagi Indonesia dan kita semua agar dapat menciptakan keamanan yang mutlak, sehingga wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri merasa aman. Dan menciptakan keamanan adalah tugas kita bersama.

Dengan memperhatikan permasalahan program desa wisata yang ada saat ini terlihat bahwa belum ada integrasi program antara kementerian Pariwisata dengan kementerian dan lembaga lainnya yang terkait, misalnya untuk menangkal ancaman ideology yang bisa saja menyusup dalam program desa wisata ini, sebaiknya kementerian wisata dapat

melibatkan Kementerian Perencanaan untuk sekaligus dapat mengimplementasikan program bela negara terhadap masyarakat desa yang menjadi target program desa wisata. Kondisi yang terjadi saat ini juga menunjukkan bahwa belum terjadinya kondisi komunikasi yang interaktif.

Terkait masalah Transparansi, sistem control dan akuntabilitas pada umumnya masih menjadi pekerjaan rumah bagi setiap bidang kementerian dan lembaga yang ada saat ini di Indonesia. ditengah krisis ekonomi akibat adanya pandemic Covid-19, masih ada pejabat pemerintah yang tertangkap karena korupsi, hal ini semua karena masih lemahnya sistem transparansi anggaran, sistem control birokrasi dan akuntabilitas kegiatan yang terus menjadi masalah yang belum ada jalan keluarnya.

Permasalahan seperti yang dijelaskan di atas terutama terkait dengan kekuatiran adanya ancaman dalam menjaga budaya yang ada dan ancaman terhadap stabilitas kemandirian dan kemandirian maka pada tulisan ini memberikan solusi seperti apa yang disampaikan oleh Kasih Prihantoro (2019) bahwa:

### **Membangun Networking yang tepat.**

Pada program kebijakan pemerintah yang terkait dengan banyak entitas yang terlibat di dalamnya maka penggunaan topologi jaringan kerja atau topologi network sangat menentukan efektifitas dan efisiensi dari pelaksanaan implementasi kebijakan.

### **Perlunya Driver Force.**

Suatu program pemerintah yang melibatkan banyak entitas yang berbeda Kementerian dan Lembaga maka diperlukan satu entitas yang dapat bertindak sebagai driver force sehingga ada kesatuan gerak dan keputusan sehingga dapat tercapai kegiatan implementasi program yang efektif dan efisien.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pengembangan desa wisata merupakan bentuk kebijakan pembangunan perdesaan yang mencoba melakukan diversifikasi desa yang selama ini banyak berbasis kepada pertanian. Desa wisata dikembangkan untuk menjadi desa yang berbasis kepada industri wisata, baik usaha jasa maupun usaha niaga dalam bentuk produk wisata. Desa wisata dalam pengembangannya merupakan proses penggalan potensi yang ada di desa baik itu berasal dari unsur alam, sosial, budaya,

masyarakat atau lainnya, sehingga sifat alamiah dan kelestarian karakteristik desa tetap terjaga dan terpelihara.

Faktor ekonomi yang menjadi permasalahan di masa pandemic Covid-19 mendapat angin segar dengan adanya program desa wisata namun demikian peril dipertimbangkan kemungkinan ancaman yang dapat menyusup disamping program tersebut, sehingga menjadi suatu solusi pada program tersebut dengan kombinasi program bela negara dari kementerian pertahanan, sehingga diharapkan terdapat imunitas terhadap masyarakat terhadap kemungkinan adanya ancaman yang menyusup. Program desa wisata melibatkan beberapa kementerian dan lembaga sehingga dipandang perlu membangun jaringan kerja atau *network* dan keberadaan *driver force* agar program desa wisata ini dapat terimplementasi dengan efektif dan efisien.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ali, I. M., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Strategi Pertahanan Laut dalam Menghadapi Ancaman Keamanan maritim di Wilayah Laut Indonesia. *Strategi Pertahanan Laut*, 6(2), 169–188.
- [2] Arto, R. S., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). Strategi Pertahanan Laut Indonesia dalam Perspektif Maritim Menghadapi Globalisasi. *Strategi Pertahanan Laut*, 5(2), 65–86.
- [3] Dipua, A., Hermawan, R., Puspitawati, D., Harahap, N., Rizanny, D., & Prakoso, L. Y. (2020). An Analysis of The South China Sea Conflict: Indonesia's Perspectives, Contexts and Recommendations. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(4), 976–990.
- [4] Guntur Eko Saputro, L. Y. (2021). Implementation of Economic Policies Facing Covid 19 in Supporting Nonmilitary Defense. *International Journal of Social Science And Human Research*, 634-642.
- [5] Harris, A., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). Strategi Pertahanan Laut dalam Rangka Ancaman Keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia II. *Strategi Pertahanan Laut*, 5(1), 15–30.
- [6] Herdiana, D. (2019). PERAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS MASYARAKAT. *JUMPA*, 63-86.
- [7] Hermawan, T., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2020). Strategi Pertahanan Laut dalam Analisa Dampak dan Upaya Pemerintah Mengamankan ALur Laut Kepulauan Indonesia. *Strategi Pertahanan Laut*, 6(3), 273–296.
- [8] Kurniawan, C., Widyarto, S., & Prakoso, L. Y. (2018). Implementasi Struktur Birokrasi Strategi Pertahanan Laut Menghadapi Ancaman di Perairan Provinsi Sulawesi Tenggara. *Strategi Pertahanan Laut*, 4(1), 1–18.
- [9] Kusuma, A. W., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). Sinergitas Komando Armada I dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam Strategi Pertahanan Laut Guna Memberantas Kejahatan Lintas Negara di Selat Malaka. *Strategi Pertahanan Laut*, 5(2), 51–64.
- [10] Kusuma, A. W., Lukman Yudho Prakoso, & Sianturi, D. (2021). THE COOPERATION BETWEEN FLEET I COMMAND AND INDONESIAN MARITIME SECURITY AGENCY IN ELIMINATING TRANSNATIONAL CRIME IN THE MALACCA STRAIT. *International Journal of Education and Social Science Research*, 4(03), 51–61. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37500/IJESSR.2021.4.305>
- [11] Hartley, Keith dan Sandler, Todd (1995). *Handbook of Defense Economics*, Volume 1. Elsevier Science. Hal 6.
- [12] Keliat, Makmur. (2010) *Ekonomi Pertahanan Indonesia*. Prisma Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi Vol.29 No.1
- [13] Listiyono, Y., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019b). Strategi Pertahanan Laut dalam Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia untuk Mewujudkan Keamanan

- Maritim dan Mempertahankan Kedaulatan Indonesia. *Strategi Pertahanan Laut*, 5(3), 103–116.
- [14] Lebo, D., Pramono, B., Prakoso, L. Y., Risman, H., & Akrimi, N. (2021, April 6). The Total War Strategy through Optimizing the Understanding of Pancasila Values in the Millennial Era. <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.02.273>
- [15] Madrohim, M., & Prakoso, L. Y. (2021). The Total War Strategy Through the Improvement of the Role of National Shipyard in Supporting Main Weapon System of Indonesian Navy. *Journal of Social and Political Sciences*, 4(1). <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.01.245>
- [16] Palupi, E., S., DAR, D., Suhardono, E., Sianturi, D., Prakoso, L. Y., & Bangun, E. (2021, March 26). Sea Defense Strategy Strengthening Through Improving The Readiness of Indonesian Naval Vessel Crew (Study: The Health Office of 1st Fleet Command) E. <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.01.266>
- [17] Prakoso, Lukman Yudho, & Aprilliyani, R. (2021). Implementasi Ilmu Teknik Elektro Bidang Pertahanan dan Militer (K. Prihantoro & S. Suhirwan (eds.); 1st ed.). CV. Aksara Global Akademia.
- [18] Prakoso, Lukman Yudho, Suhirwan, & Prihantoro, K. (2020). Sea Defense Strategy and Urgency of Forming Maritime Command Center. *Jurnal Pertahanan*, 6(2), 200–211. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33172/jp.v6i2>
- [19] Pramono, B., & Prakoso, L. Y. (2021). Political Policy for the Papuan Issue in the Context of National Defense. *ITALENISCH*, 11(2), 271–275. <http://italienisch.nl/index.php/VerlagSaue/lander/article/view/118>
- [20] Prakoso, L. Y., & Suhirwan. (2021). Defense Strategy Policy through Revitalization of East Surabaya Shipping Lanes. *ITALENISCH*, 11(2), 249–263. <https://doi.org/https://doi.org/10.1115/italienisch.v11i2.117>
- [21] Prakoso, L. Y., Salim, G., Indarjo, A., & Yusriadi. (2021). IMPLEMENTATION OF THE DÉFENSE PUBLIC POLICY DEFEND THE STATE IN INDONESIAN UNIVERSITIES. *Academy of Strategic Management Journal*, 20(2), 1–8. <https://www.abacademies.org/articles/implementation-of-the-dfense-public-policy-defend-the-state-in-indonesian-universities.pdf>
- [22] Santika, E. E. (2017). Partisipasi Masyarakat dan Pengembangan Desa Wisata. *Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana*, 8.
- [23] Surakhmad, W., 1990. Pengantar Penelitian Ilmiah. Bandung: Tarsito.
- [24] Sekretariat Jendral Dewan Ketahanan Nasional (2010)
- [25] Sartono, Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2020). Impresi dan Otoritas Pemerintah dalam Mengamankan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). *Strategi Pertahanan Laut*, 6(3), 231–256.
- [26] Sartono, Prakoso, L. Y., & Suseto, B. (2019). Perimbangan Kekuatan Laut Indonesia Masa Kini Dihadapkan dengan Geopolitik Kawasan Asia Pasifik. *Strategi Pertahanan Laut*, 5(2), 87–114.
- [27] Suhirwan, & Prakoso, L. Y. (2019a). Defense strategy at sea handling of Transnational Organized Crime (TNOG) in Nunukan Indonesia's national sea border. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 339, 12043. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/339/1/012043>
- [28] Suhirwan, & Prakoso, L. Y. (2019b). Forum Maritim Kunci Sukses Penanggulangan Ancaman Asimetris di Selat Sunda. *Seminar Dan Lokakarya Kualitatif Indonesia 2019*, 2019, 2019.
- [29] Suhirwan, Prodjonoto, K. W. A., & Prakoso, L. Y. (2020). *Archipelago State*

- 
- Strategic Ocean Tracker* (1st ed.). CV. Nas Media Pustaka.
- [30] Supriyono, Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). Pentingnya Penanaman Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Masyarakat Pesisir Pulau Terdepan sebagai Upaya Keikutsertaan Warga Negara dalam Bela Negara. *Strategi Pertahanan Laut*, 5(3), 117–132.
- [31] Widiarto, S., S., Prakoso, L. Y., S., Suhardono, E., Warka, I. W., & D.A.R, D. (2021, March 17). Optimization of Sea Defense Strategy Through Operation of the Hospital Auxiliary Vessel to Support National Defense. <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.01.262>
- [32] Zed, M., 2004. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN